

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Manfaat, Prinsip dan Implementasi *Good Corporate Governance*

1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Kondisi yang dihadapi perusahaan publik di Indonesia masih lemah dalam mengelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses kepengurusan perusahaan. Kenyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan lemahnya perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik untuk memuaskan *stakeholders* perusahaan. Dalam upaya mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, maka para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *good corporate governance* (GCG), suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, hal ini sesuai dengan penandatanganan perjanjian *Letter of intent* (LOI) dengan IMF (*International monetari fund*) tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan di Indonesia.

Good Corporate Governance (GCG) kini ditempatkan di posisi terhormat, hal itu setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu

berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* yang mempengaruhi sistem regulator yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Penerapan dan pengelolaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *Good Corporate Governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003). Munculnya berbagai skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan telah mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terutama investor terhadap pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Masalah penyimpangan juga terjadi di negara Jepang, yaitu masalah Olympus di tahun 2011, produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi. Presiden Direktur Olympus Shuichi Takayama menuding Tsuyoshi Kikukawa, yang mundur dari jabatan Presiden

dan Komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara Wakil Presiden Direktur Hisashi Mori dan auditor internal Hideo Yamada bertanggung jawab sebagai pihak yang menutupnutupi. Keduanya menyatakan siap jika dituntut hukuman pidana. Pengumuman yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendahnya dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan ini juga sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara Rp 5,1 triliun karena masalah investasi bodong tersebut.

Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governanace* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Beberapa pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Danang Febriyanto, 2013:12):

- a. Kata *Governance* berasal dari bahasa Perancis *Gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. *Good Corporate Governance* sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham

secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

- b. *Corporate governance* merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya
- c. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.
- d. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan antara unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholders* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang luas.

- e. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Good Corporate Governance* di seluruh dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance*, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.
- f. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Good Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika
- g. Menurut FCGI (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

- h. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Berdasarkan uraian mengenai *Good Corporate Governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum.

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Beberapa manfaat yang didapat dalam menerapkan *Good Corporate Governance* bagi perusahaan adalah: (Daniri Achmad,2005)

- a. Memberikan kontribusi terciptanya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang baik dalam menghadapi tantangan kedepannya.
- b. Meningkatkan legitimasi perusahaan yang dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Adanya pengakuan dan perlindungan hak dan kewajiban *stakeholders*.

- d. Adanya suatu pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan, dan partisipasi perusahaan secara legitimate.
- e. Menciptakan daya tarik kepada investor bahwa investasi aman dan dapat dikelola secara efisien, terbuka dengan dukungan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pemakaian sumber daya perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten, konsekuen dan penuh dengan komitmen diharapkan mampu membuat perusahaan akan menjadi lebih handal karena secara umum manfaat lainnya adalah : (Tjager, 2003:25)

- a. Entitas bisnis akan menjadi efisien.
- b. Meningkatkan kepercayaan publik.
- c. Menjaga *going concern* perusahaan.
- d. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.
- e. Mengurangi resiko manajemen.

Dalam praktik *Good Corporate Governace* berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap politik pemilik saham dan hutang. Aturan, pedoman, atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan akan mempengaruhi kualitas Implementasi

Good Corporate Governance perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* harus mempertimbangkan karakter perusahaan seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain sebagainya.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut SK Menteri BUMN Nomor: Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* yang diutarakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi: “

- a. Transparansi (*Transparency*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
- c. Tanggungjawab (*Responsibility*)
- d. Independensi (*Independency*)
- e. Kewajaran (*Fairness*)”.

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan informasi merupakan hal penting sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan bisa terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan yang *go public*.

Transparan secara harfiah adalah jelas (*obvious*) dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Transparansi mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengukur dan mengantisipasi segala sesuatu. Transparansi bisa dimulai dengan penyajian secara terbuka laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, kriteria yang terbuka tentang seleksi personal, informasi adanya seleksi, pengungkapan transaksi atau kontrak dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kedudukan istimewa, struktur kepemilikan, sampai kepada penyajian informasi tentang kemungkinan resiko yang dihadapi organisasi.

Kepentingan manajemen dan karyawan juga akan terkait dengan prinsip transparansi, karena pada dasarnya mereka juga berhak untuk mengambil kondisi riil suatu perusahaan, apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak. Seringkali perusahaan tidak transparansi baik terhadap pihak internal, maupun eksternal perusahaan.

Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dan berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Dengan demikian penerapan prinsip *Good Corporate Governance* tidak sekedar dapat meningkatkan

kepuasan pemegang saham dan kreditor, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan manajemen dan karyawan sebagai bagian integral dari *stakeholders* perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- 1) Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi
- 2) Mengembangkan informasi teknologi dan management information sistem untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif,
- 3) Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip *accountability* (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari *agency problem* (benturan kepentingan peran). Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui penerapan prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya *traceableness* yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya serta *reasonableness* yang berarti dapat diterima secara logis.

Surya dan Yustiavandana (2008) menyatakan bahwa, “akuntabilitas ditunjukkan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan tersebut anatar lain apa yang harus dipertanggungjawabkan, mengapa pertanggungjawaban harus diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadaidan lain sebagainya. *The oxford Advence Learner’s Dictionary* menyatakan bahwa akuntabilitas adalah *required or expected to give an explanation for one’s action*. Artinya adalah, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya.”

c. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Tanggungjawab merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perlu dipastikan adanya kepatuhan perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Setiap partisipan *Good Corporate Governance* harus tanggap dan antisipatif terhadap permintaan (*request*) maupun umpan-balik (*feedback*) dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terhadap perubahan-perubahan dunia usaha yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- 1) Tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
- 2) Menyadari akan adanya tanggungjawab sosial.

- 3) Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

d. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundangan yang berlaku. Kewajaran menjadi jiwa untuk memonitori dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Kewajaran merujuk adanya perlakuan yang setara (*equal*) terhadap semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan prinsip Kewajaran ini terutama ditujukan terhadap pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Kewajaran juga perlu pada pola perlakuan kepada *stakeholder* lainnya, misalnya pola hubungan dengan karyawan keseimbangan hak pemilik mayoritas dan minoritas harus diperhatikan, sehingga tidak ada kelompok pemilik yang dirugikan. Demikian pula halnya dengan hak-hak karyawan, kreditur, serta pemasok dan langganan, harus ditetapkan secara jelas dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkait. Keadilan dalam memenuhi hak para pemangku kepentingan yang timbul dari perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan pelanggan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- 1) Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas
- 2) Membuat pedoman perilaku perusahaan (*Corporate Conduct*) atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam (internal) dan konflik kepentingan.

e. Independensi (*Independency*)

Independensi melancarkan pelaksanaan atas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, “Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada hakikatnya sama yaitu mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang

sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan *stakeholder*, serta tanggungjawab legal manajemen”. (Effendi, 2009)

Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

1. Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi)
2. Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga secara praktis perusahaan mampu meminimalkan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dan pemegang saham.
3. Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka dapat meyakinkan dirinya akan memperoleh keuntungan investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi, selain itu juga

harus dapat menjamin terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri.

4. Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance*

- a. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bahan pertimbangan utama bagi kreditor dalam mengevaluasi potensi suatu perusahaan untuk menerima pinjaman kredit. Bahkan bagi perusahaan yang berdomisili di negara-negara berkembang, implementasi prinsip *good corporate governance* secara konkret, dapat memberikan kontribusi untuk memulihkan kepercayaan para kreditor terhadap kinerja perusahaan yang telah dilanda krisis, misalnya di Indonesia.
- b. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan.
- c. perusahaan sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

(Muhammad Arief,2009)

B. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Syarat keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut (Eka Hardikasari, 2011:16) :

Faktor Eksternal

1. Terdapat sistem hukum yang baik
2. Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat
4. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat
5. Semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.

Faktor Internal

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
3. Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik.

C. Pengertian dan Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan

1. Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja perusahaan dapat ditentukan dari sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *Good Corporate Governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam penilaian *Good Corporate Governance* yang dilakukan oleh IICG terbukti telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya, semakin tinggi penerapan *Good Corporate Governance* yang diukur oleh *Corporate Governance Perception Indeks (CGPI)* maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. (Wardani, 2008)

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. (Cahyani, 2009)

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standart seperti biaya-biaya yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya (Ceacilia Srimindarti, 2004).

Sebelum memahami masalah penilaian kinerja lebih jauh, maka ada beberapa pengertian kinerja yaitu “keberhasilan personal, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan”. (Mulyadi, 2007)

Pengukuran Kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (mission accomplishment) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa

ataupun suatu proses. pengukuran kinerja yang didefinisikan sebagai “*performing measurement*” adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. (Darmawati, 2005)

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Menurut Irham Fahmi (2011:2) menyatakan bahwa, “Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat menggunakan analisis laporan keuangan atau analisis rasio.

Ross dkk. (2009:78) menyatakan bahwa, “rasio merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada diantara berbagai bagian informasi keuangan. Kinerja keuangan yang dimaksud dapat dinilai dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. dengan adanya rasio keuangan, para pengguna laporan keuangan dapat menghitung dan menginterpretasikan ukuran-ukuran kewajiban, likuiditas, profitabilitas, manajemen aset dan nilai pasar perusahaan”.

Ada 5 jenis rasio keuangan yang biasa digunakan untuk menilai kinerja perusahaan (Atmaja, 2008:64), yaitu : “

- a. *Lverage ratio*, yaitu memperlihatkan berapa hutang yang digunakan.
- b. *Liquidity ratio*, untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.
- c. *Effectivity/Efficiency* atau *turnover* atau *assets management ratio* yaitu mengukur seberapa efisiensi/efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivitya.

- d. *Profitability ratio*, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba.
- e. *Market value ratio*, yaitu memplihatkan bagaimana perusahaan dinilai oleh investor di pasar modal.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2008:299), jenis dari rasio keuangan yang dapat dihitung ada beberapa macam, yaitu: “

- a. Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu aktiva lancar dan utang lancar
- b. Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan dilikuiditas. Rasio ini dapat dihitung dari pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang.
- c. Rasio Rentabilitas/Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Rasio*.
- d. Rasio *Leverage*, rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*), perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari hutang. rasio ini juga bisa dianggap bagian dari rasio solvabilitas.
- e. Rasio Aktivitas, rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.
- f. Rasio Pertumbuhan (*Growth*), rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan asset dari tahun ke tahun
- g. Rasio Penilaian Pasar (*Market Based Ratio*), rasio ini merupakan rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi/keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.
- h. Rasio Produktivitas, jika perusahaan ingin dinilai dari segi produktivitas unit-unitnya maka bisa dihitung rasio produktivitasnya. rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.”

Nilai perusahaan dapat didefinisikan sebagai nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten

bersangkutan. Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2007:7) “nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual”. Sedangkan menurut Keown, et al. (2010) “nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar”. harga yang bersedia dibayar oleh calon pembel diartikan sebagai harga pasar atas perusahaan itu sendiri. Di bursa saham, harga pasar berarti harga yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap lembar saham perusahaan. oleh karenanya dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang selalu dikaitkan dengan harga saham.

“Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham” Brigham dan Houston (2009:156). Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan sebab nilai perusahaan menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya, tidak hanya pada kinerja perusahaan namun juga terkait pada prospek perusahaan dimasa depan.

Menurut Suharli (2006:3), ada beberapa pendekatan yang biasa dilakukan untuk menilai perusahaan, di antaranya:“

- a. Pendekatan laba antara lain metode rasio tingkat laba atau Price Earning Ratio.
- b. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas.
- c. Pendekatan dividen antara lain metode pertumbuhan dividen.
- d. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva.
- e. Pendekatan harga saham.
- f. Pendekatan *Economic Value Added* (EVA)”.

Nilai perusahaan dalam beberapa literatur yang dihitung berdasarkan harga saham disebut dengan beberapa istilah di antaranya:

1. *Price to Book Value* (PBV) yaitu perbandingan antara harga saham dengan nilai buku saham.
2. *Market to Book Ratio* (MBR) yaitu perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham.
3. *Market to Book Assets Ratio* yaitu ekspektasi pasar tentang nilai dari peluang investasi dan pertumbuhan perusahaan yaitu perbandingan antara nilai pasar aset dengan nilai buku aset.
4. *Market Value of Equity* yaitu nilai pasar ekuitas perusahaan menurut penilaian para pelaku pasar. Nilai pasar ekuitas adalah jumlah ekuitas (saham beredar) dikali dengan harga per lembar ekuitas.
5. *Enterprise value (EV)* yaitu nilai kapitalisasi market yang dihitung sebagai nilai kapitalisasi pasar ditambah total kewajiban ditambah *minority interest* dan saham preferen dikurangi total kas dan ekuivalen kas.
6. *Price Earnings Ratio* (PER) yaitu harga yang bersedia dibayar oleh pembeli apabila perusahaan itu dijual. PER dapat dirumuskan sebagai $PER = Price\ per\ Share / Earnings\ per\ Share$. Menurut Tandililin (2010) "bahwa pendekatan PER merupakan pendekatan yang lebih populer dipakai di kalangan analisis saham dan para praktisi. Pendekatan PER disebut juga pendekatan multiplier dimana investor

akan menghitung berapa kali nilai *earnings* yang tercermin dalam harga suatu saham”.

7. *Tobin's Q* yaitu nilai pasar dari suatu perusahaan dengan membandingkan nilai pasar suatu perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan dengan nilai penggantian aset (*asset replacement value*) perusahaan.

Salah satu versi *Tobin's Q* yang dimodifikasi dan disederhanakan oleh Chung & Pruitt (1994) terhadap rumus yang dibuat oleh Lindenberg & Ross (1981) dalam Wolfe (2003) adalah:

$$q = \text{Total Market Value of Firm} / \text{Total Asset Value}$$

atau

$$q = (\text{MVS} + \text{D}) / \text{TA}$$

dimana :

q = *Tobin's Q*

MVS = *Market value of all outstanding shares, i.e. the firm's Stock Price * Outstanding Shares.*

D = *Total Debt*

TA = *Firm's Assets*

Rumus untuk pengukuran rasio ini ditulis ulang menjadi:

$$\text{Tobin's } Q \text{ Ratio} = \frac{(\text{Current Price} \times \text{Total Shares}) + \text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Jika nilai pasar semata-mata merefleksikan *asset* yang tercatat suatu perusahaan maka *Tobin's Q* akan sama dengan 1. Jika *Tobin's Q* lebih besar dari 1, maka nilai pasar lebih besar dari nilai *asset* perusahaan yang tercatat. Hal ini menandakan bahwa saham *overvalued*. Apabila *Tobin's Q* kurang dari 1, nilai pasarnya lebih kecil dari nilai tercatat *asset* perusahaan. Ini menandakan bahwa saham *undervalued*.

a. Perputaran Asset

Salah satu ukuran yang terpenting untuk mengukur perputaran semua asset yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah asset yang dimiliki adalah rasio perputaran asset (*Total Assets Turnover*). Cara menghitungnya adalah dengan membagi total pendapatan atau penjualan dengan rata-rata total asset perusahaan atau dirumuskan sebagai :

$$\text{Total Assets Turnover} = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Rata-rata total asset}}$$

Rasio ini sangat berguna untuk menghitung nilai penjualan yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah assetnya. Semakin besar rasio total assets turnover suatu perusahaan maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan tersebut semakin baik. Semakin baik kinerja perusahaan maka semakin besar keinginan investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap harga saham di pasar.

b. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Profitabilitas juga dapat didefinisikan sebagai ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Profitabilitas digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana keefektifan dari keseluruhan manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi perusahaan.

Menurut Arifin ★ Ali(2004:116), “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya”. Laba ini merupakan keuntungan setelah bunga dan pajak yang merupakan laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Menurut Besley dan Brigham (2008:463)“Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan manajemen baik dalam mengelola likuiditas, aset, maupun kewajiban perusahaan”.

Semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik bagi perusahaan itu sendiri. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham. Semakin besar tingkat kemakmuran yang diberikan oleh perusahaan akan menarik minat investor untuk memiliki perusahaan tersebut dan akan memberikan pengaruh positif terhadap harga saham di pasar. Ini berarti akan menaikkan nilai perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2011), ada dua tipe rasio profitabilitas, yaitu yang menunjukkan profitabilitas sehubungan

dengan penjualan, dan yang menunjukkan profitabilitas sehubungan dengan investasi. Rasio profitabilitas sehubungan dengan penjualan adalah:

1. *Gross Profit Margin* :
$$\frac{(Sales - Cost\ Of\ Goods\ Sold)}{Sales}$$
2. *Net Profit Margin* :
$$\frac{Net\ Profit\ After\ Taxes}{Sales}$$

Rasio profitabilitas sehubungan dengan investasi adalah:

1. *Return on Equity (ROE)*:
$$\frac{(Net\ Profit\ After\ Taxes - Preferred\ Stock\ Dividen)}{Shareholder\ Equity}$$
2. *Return on Assets (ROA)* :
$$\frac{Net\ Pofit\ After\ Taxes}{Total\ Assts}$$
3. *Net Operating Profit Rate of Return*:
$$\frac{Earning\ Before\ Interest\ And\ Taxes}{Total\ Assets}$$

Rasio ini sering disebut dengan *Basic Earning Power Ratio*.

Menurut Atmaja (2008), rasio-rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas adalah:

1. *Return on Assets (ROA)* :
$$\frac{Laba\ Bersih\ sesudah\ Pajak}{Aktiva\ Total}$$
2. *Return on Equity (ROE)* :
$$\frac{Laba\ Bersih\ sesudah\ Pajak}{Modal\ Sendiri}$$
3. *Net Margin atau Profit Net Margin*:
$$\frac{Laba\ Bersih\ sesudah\ pajak}{Penjualan}$$
4. *Basic Earning Power (BEP)* :
$$\frac{Earnings\ Before\ Interest\ and\ Taxes}{Rata-rata\ Total\ asset}$$

Dalam penelitian ini, parameter profitabilitas yang digunakan adalah *basic earnings power ratio* (BEPR) yaitu persentase dari laba bersih sebelum bunga dan pajak (*Earnings Before Interest and Tax* atau EBIT) yang diperoleh dari penggunaan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan atau dengan kata lain rasio ini mengindikasikan bagaimana aset suatu perusahaan

digunakan untuk menghasilkan laba bersih sebelum bunga dan pajak. Rasio ini dihitung dari proporsi laba bersih sebelum bunga dan pajak dibagi dengan rata-rata jumlah aset dan dirumuskan sebagai BEPR :

$$\frac{EBIT}{\text{Rata-rata Total Asset}}$$

2. Tujuan Penilaian Kinerja keuangan Perusahaan

Menurut Serli (2011:28), Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
- b. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangannya jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
- d. Untuk meningkatkan tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

D. Hubungan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Hubungan antara *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima, walaupun saat ini ada banyak pengakuan yang luas bahwa pembentukan *Good Corporate Governance* secara substansial dapat mempengaruhi pemegang saham. McKinsey dan Co (2002) melakukan *survey* yang hasilnya menunjukkan bahwa

para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *Good Corporate Governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *Good Corporate Governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* telah berupaya untuk meminimalkan resiko.

Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusannya menerapkan *good corporate governance*. Dalam majalah SWA (2001) menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 25 perusahaan peringkat teratas yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik secara tidak langsung menaikkan nilai sahamnya. Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, umumnya *Good Corporate Governace* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak terhadap kinerjanya

Menurut Xiaonian, *et.al.* (2000:312) pemegang saham saat ini sangat aktif dalam meninjau kinerja perusahaan karena mereka menganggap bahwa *good corporate governance* yang lebih baik akan memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi bagi mereka”. Penerapan *good corporate governance* yang baik berfokus pada proses manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kinerja dan daya saing serta kreatifitas nilai perusahaan.

E. Review Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil penelitian
1	V. Titi Purwantini (2012)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	1. Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan tetapi tidak signifikan. 2. Kepemilikan Institusional mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif 3. Kepemilikan terkonsentrasi mempengaruhi secara positif nilai perusahaan dan kinerja keuangan
2	Iqbal Bukhori, Raharja (2012)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (studi empiris perusahaan terdaftar di BEI 2010)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3	Ni Ketut	Dampak <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil penelitian menunjukkan

	Sukasih dan Ni Luh Nyoman Ayu Suda Susilawati (2011)	terhadap Kinerja perusahaan (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia)	bahwa <i>good corporate governance</i> signifikan terhadap kinerja yang di ukur dengan ROA tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ukuran perusahaan dan lama perusahaan
4	Rafriny Amyulianthy (2012)	Pengaruh Struktur <i>Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan Publik Indonesia	<p>1. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan</p> <p>2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan</p> <p>3. Dewan komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan</p> <p>4. Dewan direksi Independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan</p>

5	Wajdi Ben Rejeb, Mohamed Frioui (2012)	<i>The Impact of Good Corporate Governance Practices on Stakeholder's Satisfaction in Tunisian Listed Companies</i>	Hasil ini berpengaruh positif dan signifikan antara pengimplikasian dasar prinsip <i>good corporate governance</i> (responsibilitas, transparansi, dan akuntabilitas) dan kepuasan <i>stakeholders</i> terhadap perusahaan yang ada di negara Tunisia.
---	----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai indikator atas penilaian kinerja perusahaan, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terfokus pada PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. pada tahun 2015 sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *Return On Assets* (ROA) sebagai indikator penilaian kinerja, dan sumber data terfokus pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012.